

# **DISTORSI RUANG PUBLIK DAN KUASA POLITIK ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN**

**NEKA FITRIYAH**



**KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN PERDESAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



*@Hak cipta milik IPB University*

**IPB University**



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA\*

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Distorsi ruang publik dan kuasa politik *elite* lokal dalam pembangunan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2021

*Neka Fitriyah*  
NIM I362160091

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





## RINGKASAN

NEKA FITRIYAH. Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik *Elite* Lokal dalam Pembangunan. Dibimbing oleh SARWITITI SARWOPRASODJO sebagai ketua Komisi, SOFYAN SJAF dan ENDRIATMO SOETARTO sebagai anggota komisi.

Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih berkuat pada persoalan kemiskinan. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat tidak menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan, karenanya persoalan kemiskinan selalu menjadi isu sentral di daerah ini. Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin. Program Jamsosratu sudah 18 tahun berjalan dan program infrastruktur jalan sudah dicanangkan sejak era orde baru. Tetapi, Pemda Kabupaten Pandeglang hanya mampu membiayai 30% program infrastruktur jalan yang dibutuhkan. Implikasinya, banyak pergerakan barang dan jasa terhambat, mengganggu produktivitas ekonomi dan memperlemah partisipasi masyarakat.

*Elite* lokal di Pandeglang (ulama, jawara dan *elite* desa) memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tetapi kemudian, kemampuan politis para *elite* lokal belum sepenuhnya dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. *Elite* lokal memiliki berbagai agenda, baik agenda pembangunan, agenda politik maupun agenda kelompok. Realitas ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang mewakili aspirasi terhadap para *elite* lokal. Implikasinya posisi *elite* lokal menjadi semakin elitis di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memudahkan *elite* lokal dalam membangun dan memperoleh dukungan politik praktis. Padahal, jika orientasi *elite* lokal mengarah pada pemberdayaan masyarakat, kekuatan komunikasi politik *elite* lokal melebihi kekuatan formal (pimpinan daerah). Kekuatan ulama dan jawara dalam beberapa realitas sosial bahkan melampaui batas geografis yang belum tentu dimiliki oleh *elite* lain.

Proposisi utama penelitian ini adalah komunikasi politik para *elite* lokal dipengaruhi oleh berbagai agenda (kepentingan) yang didasari oleh perbedaan orientasi terhadap pembangunan. Akibatnya konsensus dalam ruang publik tidak melalui dialog kritis. Dampak yang lebih jauh, ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Yang terjadi adalah kelesuan partisipasi dan ketidakpercayaan masyarakat yang disebabkan diskoneksi orientasi para *elite* lokal dalam pembangunan. Implikasinya, komunikasi pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, masyarakat mempercayakan aspirasinya pada para *elite* lokal tanpa mengkritisnya terlebih dahulu. Perbedaan orientasi dan agenda antar para *elite* lokal, menjadikan ruang publik syarat dengan agenda dan kepentingan sehingga ruang publik terdistorsi dan tidak lagi menjadi medium yang netral.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik komunikasi politik *elite* lokal dalam pembangunan, seperti apakah pertemuan politis yang diikuti, bagaimana orientasi dan tipe komunikasi politik yang digunakannya, apakah berdampak pada upaya penyadaran kritis atau sebaliknya

serta bagaimana keberfungsian ruang publik. Permasalahan ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menekankan pencapaian konsensus melalui klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (primer). Tiga metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni: metode (1) Studi kasus (2) *Life history* dan (3) Dokumentasi. Komunikasi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku politik melalui pesan dan simbol-simbol.

Selain menghasilkan berbagai temuan, penelitian ini menjawab beberapa persoalan: Pertama, dialog dan diskursus dalam ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis sehingga konsensus yang dicapai belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Pencapaian konsensus dalam ruang publik, prosesnya dapat tercapai jika ada kesetaraan. Kesetaraan peran, akses, kesetaraan literasi, kesetaraan perlakuan dan kesetaraan status, adalah prasyarat terjadinya dialog kritis dalam ruang publik. Kesetaraan ini akan meminimalisir terjadinya dominasi atas opini yang dikembangkan dan berkembang. Jikapun dalam realitasnya kesetaraan sulit ditemui, maka *bracketing* menjadi solusinya.

Ruang publik yang ada di Pandeglang berkembang seiring dengan perkembangan berbagai aspirasi, agenda dan kepentingan dari para *elite* dan masyarakat. Akibatnya, ruang publik menjadi arena kontestasi politik yang melahirkan kelompok-kelompok dan mengarah pada oligarkhi. Keberfungsian ruang publik yang mensyaratkan kesetaraan, penghargaan dan kesempatan di Pandeglang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Para *elite* lokal dalam persoalan pembangunan, orientasi politiknya tidak selamanya untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat mikro. Banyak masyarakat di pedesaan khususnya yang kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara memberdayakan dirinya serta mengaspirasikan gagasannya. Situasi ini dimanfaatkan oleh sebagian *elite* untuk membangun opini mayoritas dalam pertemuan-pertemuan di ruang publik. Pada posisi inilah ruang publik menjadi terdistorsi oleh agenda-agenda politik yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Kedua, tindakan berbahasa ulama dan jawara dalam ruang publik ditandai dengan pesan: Kognitif, Interaktif dan Ekspresif. Kognitif menekankan pada rasionalitas dalam mengeksplorasi persoalan pembangunan. Tindakan interaktif menekankan pada proses pembentukan konsensus yang berfungsi sebagai persuasi, pengendalian sosial dan *labenswelt*. Adapun tindakan ekspresif mengarah pada muatan-muatan pesan ketulusan dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Melihat kondisi sosiologis masyarakat Pandeglang, tidak semua tindakan berbahasa dalam ruang publik dapat dilaksanakan secara bersamaan. Literasi politik yang terbatas, akses dan persoalan otoritas dan struktural menyebabkan hanya beberapa tindakan berbahasa yang umum berkembang di Pandeglang. Pesan kognitif dan interaktif adalah tindakan berbahasa yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Ketiga, komunikasi politik terjadi dalam ruang publik karena ada perbedaan orientasi yakni orientasi pemberdayaan dan politik praktis. Pada program Jamsosratu *elite* lokal cenderung memiliki orientasi yang sama dan bersatu, tetapi pada program infrastruktur jalan *elite* lokal memiliki ragam orientasi dan kepentingan yang saling berhadap-hadapan. Keempat, tipe

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



komunikasi politik *elite* lokal terdiri dari empat tipe tindakan komunikatif: (1) Tindakan teleologis untuk membangun konsensus (2) Tindakan normatif untuk melaksanakan konsensus (3) Tindakan dramaturgis untuk membangun popularitas (4) Tindakan komunikatif untuk membangun konsensus melalui bahasa dan dialog kritis.

Tipe tindakan komunikatif ini *embeded* dalam sikap dan perilaku *elite* lokal dalam menyusun dan merespon program pembangunan. Penelitian ini juga menemukan temuan-temuan lain diantaranya: (1) Kedekatan *para elite* lokal dalam persoalan pembangunan terjadi selain karena faktor patrimonial dan struktural juga karena faktor relasi yang sebelumnya sudah terbangun (2) Kondisi sosiologis masyarakat Pandeglang dengan struktur dan kultur religius memposisikan ulama dan jawara menjadi faktor determinan dalam pembangunan dan politik lokal (3) Ada dua tipologi ulama dan jawara yakni tradisional dan modern yang kemudian dibagi menjadi dua kategori yakni organik dan simultan. Ulama dan jawara modern adalah kelompok yang telah mengalami transisi dari *elite* tradisional pedesaan menjadi *elite* legal formal dalam struktur sosial dan politik. Sedangkan ulama dan jawara tradisional adalah kelompok yang masih mempertahankan peran-peran tradisional yang aktivitas kesehariannya dekat dengan masyarakat secara mikro.

Kata kunci: Ruang publik, komunikasi, politik, pembangunan, *elite* lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## SUMMARY

NEKA FITRIYAH. The Distortion of Public Space and the Political Power of Local Elites in the Development. Under supervision of SARWITITI SARWOPRASODJO as the chairman of the commission, SOFYAN SJAF and ENDRIATMO SOETARTO as the members of the commission.

Throughout the implementation of the regional autonomy in 2000, the issue of the development in the district of Pandeglang was still remaining on the poverty issue. Regulations and development directions made were not creating Pandeglang free from poverty, therefore the poverty issue has always been a central issue in this region. This situation was honed with the increase in number of poverty as many as 24.790 in 2017 than previously 675.040 people in March 2018, a 0.14 point increase. The Jamsosratu program has been running for 18 years and the road infrastructure program has been initiated since the New Order period. Nevertheless, the local government of Pandeglang district is only able to finance 30% of the required road infrastructure program. As an implication, the movement of goods and services has been hindered and disrupting the economic productivity and weakening public participation.

The local elites in Pandeglang (ulama, jawara and village elites) have the ability to direct and arrange the community as the subject of development. However, the political capacity of the local elites has not been able to fully place society as the subject of development. The local elites have various agendas, both the development, political, and group agendas. This reality is reinforced by the attitude of the community that represents the aspirations of the local elites. In consequence, the position of the local elites is becoming increasingly elitist in the midst of society. Therefore, it is easier for the local elites to build and gain a practical political support. Albeit if the orientation of the local elites leads to community empowerment, the strength of the political communication of the local elites will exceed the formal strength (regional leadership). The power of ulama and jawara in some social realities even transcends geographical boundaries which is not necessarily owned by other elites.

The main proposition of this research is that the political communication of the local *elites* is influenced by various agendas (interests) which are based on the differences in the orientation towards the development. As a result, the consensus in the public sphere does not go through a critical dialogue. As a further impact, the public sphere has not yet fully led to critical awareness and public participation. What happens is a lack of participation and public distrust caused by the disconnection of the local *elites*' orientation towards the development. As an implication, the communication process in the development is not taking part properly. For example, the community assigns their aspirations on the local elites without criticizing beforehand. The differences in orientation and agendas among the local elites, have created a public sphere packed with agendas and interests so that the public sphere is distorted and is no longer a neutral medium.



The purpose of this research is to find out how the political communication practices of local *elites* in the development, such as what political meetings are followed, which orientation and type of political communication are used, whether it has an impact on critical awareness efforts or vice versa and how the public sphere functions. These problems are then reviewed using the Habermas' theory of communicative action (1984) which emphasizes a consensus achievement through claims of truth, accuracy, and honesty. This study then used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews and primary observations. Three research methods are used in this research, namely: (1) a case study, (2) a life history and (3) documentation. Political communication in this research is interpreted as a process of delivering messages to influence the formation of political attitudes and behavior through messages and symbols.

In addition to producing various findings, this research answers several problems: First, dialogue and discourse in the public sphere have not fully led to critical awareness so that the consensus reached has not reflected the aspirations of the community. The process of achieving consensus in the public sphere, can be realised if only there is equality. The equality of roles, access, literacy, treatment and status are prerequisites for a critical dialogue in the public sphere. This equality will minimize the dominance of the growing opinions. Even if in the reality, the equality is difficult to find, then the *bracketing* becomes the solution.

The public spheres in Pandeglang develops along with the development of various aspirations, agendas and interests of the *elites* and society. As a result, the public sphere has become the arena for political contestation that gave birth to groups and led to oligarchy. The functioning of public sphere which requires equality, respect and opportunities in Pandeglang has not been fully realized. The local elites in the development issues, their political orientation are not always to strengthen and to empower the micro community. People, mostly in rural areas, are confused and don't know how to empower themselves and inspire their ideas. This situation is then exploited by some *elites* to build the majority opinion in the meetings in public spheres. It is in this position that the public sphere becomes distorted by political agendas on behalf of the public interest.

Secondly, the language actions of ulama (scholars) and jawara in public spheres are marked by messages: Cognitive, Interactive and Expressive. Cognitive messages emphasizes on the rationality in exploring issues in the development. Interactive action emphasizes on the consensus building process which functions as persuasion, social control and *labenswelt*. The expressive action leads to messages of sincerity and builds critical awareness of society. Viewing the sociological condition of the Pandeglang community, not all language actions in the public spheres can be carried out simultaneously. A limited political literacy, access and structure, and authority problems cause only a few language actions that are common in Pandeglang. Cognitive and interactive messages are the language actions which are more easily accepted by the public.

Thirdly, political communication occurs in the public sphere due to the differences in the orientation, that is empowerment and practical politics orientation. In the Jamsosratu program, the local elites tend to have a similar and unified orientation, however, in the road infrastructure program, the local elites

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



have a various orientation and opposing interests. Fourth, the types of local elites' political communication are consisted of four types of communicative actions: (1) the teleological action to build a consensus (2) the normative action to do a consensus (3) the dramaturgical action to build popularity (4) the communicative action to build a consensus through a critical dialogue and language.

This type of communication action is embedded within the attitudes and behaviors of local elites in preparing and responding to the development programs. This research also found that: (1) the closeness of local elites in the development programs occurs due to not only patrimonial and structural factors, but also a relational factor that has previously been built; (2) the sociological conditions of Pandeglang community with a religious culture and structure have put in place ulama (scholars) and jawara to be a determinant factor in the development and local politics; (3) there are two typologies of ulama and jawara: traditional and modern, which are divided into two categories, namely organic and simultaneous. A modern ulama and jawara is a group that has experienced the transition from the traditional rural elites into a legal formal elites in the political and social structure. Meanwhile, a traditional ulama and jawara is a group that has preserved traditional roles whose daily activities are still close to the society at a micro level.

**Keywords:** public spheres, communication, politics, development, local elites

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## © Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



# **DISTORSI RUANG PUBLIK DAN KUASA POLITIK ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN**

**NEKA FITRIYAH**

Disertasi  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Doktor pada  
Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian Perdesaan

**KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN PERDESAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**



*@Hak cipta milik IPB University*

**Penguji Luar Komisi Pembimbing Pada Ujian Tertutup Disertasi**

1. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabuddin, M.Si.
2. Dr. Rilus A. Kinseng, M.A.

**Penguji Luar Komisi Pembimbing Pada Ujian Terbuka Disertasi**

1. Dr. Rilus A. Kinseng, M.A.
2. Dr. Dra. Enong Suhaeti., M.Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Disertasi : Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik Elite Lokal dalam Pembangunan  
Nama : Neka Fitriyah  
NIM : I362160091

Disetujui oleh

Pembimbing 1  
DR. Sarwititi Sarwoprasodjo, MS.



Pembimbing 2  
Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si.



Pembimbing 3  
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Prof. Dr. Ir. Sumardjo., M.S.  
NIP: 195802251985031001



Dekan Sekolah Pascasarjana  
Prof. Dr. Ir. Miftah Fauzi., M.Eng.  
NIP: 196004191985-31002



Tanggal Ujian Tertutup: 05 Januari 2021

Tanggal Lulus: 02 Februari 2021





*@Hak cipta milik IPB University*

**IPB University**



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt saya panjatkan karena dengan kuasa dan kasih sayang Nyalah saya dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung dan membantu saya selama proses studi, penelitian, penyusunan laporan hingga rampungnya Disertasi ini. Shalawat dan salam tidak lupa saya curahkan kepada nabi besar Muhammad Saw karena beliau adalah yang menghantarkan umat manusia dari ketidaktahuan menuju pengetahuan yang hakiki. Ucapan terimakasih tak terhingga saya haturkan kepada seluruh komisi pembimbing yang dengan kesabaran, ketekunan dan daya kritisnya memberikan arahan, pandangan dan pemikiran dalam menyusun Disertasi ini. Kepada Ibu Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S., yang dengan rela meluangkan waktu, tenaga serta kritiknya agar penelitian ini tetap dalam koridor komunikasi pembangunan, yang disisi lain karena perkemabngannya sangat lentur diadopsi oleh disiplin-disiplin ilmu lain. Kepada Dr. Sofyan Sjaf, M. Si., dengan konsep entisitas dan politik lokalnya memberikan penulis wawasan baru, bahwa praktik politik dalam bentuk yang tersamar sekalipun akan berujung pada politik penguatan entitas. Kepada Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. yang dengan bijak memberikan penulis keberanian untuk berfikir melampaui batas-batas dan sekat-sekat pendefinisian suatu ilmu atau pengetahuan.

Tidak lupa saya haturkan terimakasih kepada MUI Provinsi Banten dan MUI Kab. Pandeglang yang tidak bosan-bosan merefleksikan sejarah peran dan kontribusi ulama dalam pembangunan. Kepada BPPKB Provinsi dan Kab. Pandeglang yang dengan lantang berbicara tentang peran serta jawara dalam perspektif sejarah. Kepada ketua NU, Muhammadiyah, MA, Mal-NU, FSPP, dan pimpinan pondok pesantren salafi di Pandeglang. Kepada DPUPR Kab. Pandeglang yang berkenan mengizinkan penulis mengikuti berbagai pertemuan, dan terlibat dalam berbagai diskusi terkait perkembangan infrastruktur jalan di Pandeglang. Kepada Dinsos Kab. Pandeglang yang selain mau berdiskusi juga bersedia menemani penulis di lapangan. Kepada tenaga pendamping Jamsosratu, kepada rekan-rekan aktivis LSM, kepada KADIN, GAPINDO, GAPENSI, HIPKA dan organisasi pengusaha lain yang tanpa sekat menceritakan fenomena bisnis dan kekuatan *elite* lokal yang mempengaruhi dinamika pembangunan di Pandeglang. Kepada RTSM penerima hibah dan tentu kepada jawara-jawara desa yang masih bangga dengan profesinya masing-masing.

Kepada teman-teman seperjuangan KMP 2016 yang paham betul tentang bagaimana perjuangan dalam menumpuh pendidikan Doktor. Tentu dengan diskusi dan kebersamaan akhirnya kita sapat melalui setiap tahapan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi. Kepada teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untirta, walaupun selama empat tahun jarang bertemu tetapi tetap menyemangati dan mendoakan dari kejauhan. Kepada teman-teman sejawat di FISIP Untirta terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk saling menyemangati. Kepada teman-teman Plasma Institut terimakasih, karena telah memberikan keceriaan, kegembiraan yang tetap patut dirasakan walaupun dalam berbagai tuntutan akademik, terimakasih karena telah memberikan waran lain dalam bersahabat. Kepada kawan-kawan di DPP ISKI terimakasih telah memberikan wahana pembelajaran dan relasi yang cukup luas, dan selalu



memaklumi kesibukan kuliah di IPB. Kepada teman-teman jurnalis di Kab. Serang terimakasih telah memberikan banyak akses dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian,

Terakhir tetapi terutama buat keluarga besar di Bogor. Terimakasih kepada almarhum ayahanda E. Soetisna dan Alamruhm ibunda Yoyoh Rodyah, ini impianmu yang sudah sedikit ananda wujudkan, lebih sepuluh tahun telah meninggalkan tetapi *spirit* dan nilai-nilai kebaikan masih lekat dalam diri ananda. Semoga menjadi amal jariyah untuk beliau. Untuk keluarga besar di Mancak, ucapan terimakasih karena telah turut bangga. Terimakasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengantarkan penulis pada tahapan yang besar ini. Kepada teh Nina Sutinah, a Daden Rukmana, a Engkus Permana, a Endang Ruhhiyat, a Diwan Rusdiawan, adikku tercinta Nita Marlina dan Ahmad Riyadi Wijaya terimakasih atas doa-doa dan semangatnya. Kepada Ipar-Ipar, ka Taufik Idham, teh Tuti, teh Rohmah, Teh Suryani, dan Teh Shanti. Kepadakeponakan dan saudara saudara sepupu di Bogor terimakasih banyak.

Ucapan terimakasih tak terhingga tentu kepada yang tercinta suamiku Khoirul Umam yang banyak memberikan semangat dan tetap bersabar tatkala penulis melampiasikan beratnya tugas studi Doktoral dengan cara kekanak-kanakan. Terimakasih terutama ketika masa-masa penyelesaian studi, tetap bersabar dan mendukung. Kepada anak-anakku yang turut berjuang, kepada ka Firza Kh. Qalbani yang rela terpisah jauh dari sejak SD kelas 4, kepada Farash Anindhia Kh Aqifah yang candaan dan manjanya bikin semua menjadi lebih semarak dan cenderung tak terkendali, kepada Deril Rafiandra Kh. Musyaffa yang selalu mengalah, tenang dan bertanggung jawab. Terimakasih karena telah banyak berkorban dan menyemangati, terimakasih telah membuat hidup ini menjadi lebih sempurna, menggembirakan dan tentu penuh kebahagiaan.

Terakhir tentu penulis berharap semoga Disertasi ini banyak memberikan manfaat bagi siapapun yang memiliki ketertarikan dalam bidang komunikasi politik dan sosiologi, tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang memiliki keterikatan dalam berbagai topik penelitian. Penulis menyadari bahwa Disertasi ini basih banyak kekurangan dan kelemahannya, pun masih banyak yang perlu diluruskan, karenanya penulis menjadikan Disertasi ini sebagai penelitian awal dari penelitian-penelitian lanjutan yang sudah penulis rancang dikemudian hari untuk memperkuat dan mempertegas temuan yang dihasilkan. Terakhir tepat sepertinya jika saya sampaikan bahwa “Disertasi yang baik adalah Diertasi yang selesai” begitu kata-kata yang sering disampaikan oleh Dosen KMP FEMA-IPB.

Bogor, April 2021

*Neka Fitriyah*

## DAFTAR ISI

RINGKASAN	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Komunikasi Pembangunan	8
2.3 Komunikasi Politik	12
2.4 Ruang Publik	15
2.5 Teori Tindakan Komunikatif	18
2.5.1 Sejarah	18
2.5.2 Rasionalitas Komunikatif	19
2.5.3 Asumsi-Asumsi Dasar	21
2.5.4 Proposisi-Proposisi	22
2.5.5 Kritik terhadap Teori Tindakan Komunikatif	23
2.6 State of the Art	24
2.7 Kerangka Pemikiran	34
2.8 Kebaharuan ( <i>Novelty</i> )	39
III METODE PENELITIAN	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Perspektif Konstruktivis	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Proses Pelaksanaan Penelitian	48
3.5 Unit Analisis Data	51
3.6 Teknik Analisa Data	51
IV PANDEGLANG: STRUKTUR DAN KULTUR MASYARAKAT	56
4.1 Sejarah Pandeglang	56
4.2 Genealogi Ulama dan Jawara Pandeglang	59
4.3 Struktur dan Kultur Masyarakat Pandeglang	65
4.3.1 Perkembangan Peran Ulama dan Tingkatan Keilmuannya	66
4.3.2 Perkembangan Peran Sosial Jawara	70
Jawara sebagai Jaro	73
Jawara sebagai Guru Silat	73

Guru Ilmu Magi	73
Pejabat atau Politisi	74
Pemilik Modal atau Pengusaha	74
4.4 Tipologi Ulama dan Jawara dalam Pembangunan	78
4.5 Kondisi Kependudukan dan Pembangunan	82
4.6 Ikhtisar	84
<b>V RUANG PUBLIK DALAM ROGRAM</b>	<b>86</b>
<b>INFRASTRUKTUR JALAN</b>	<b>86</b>
5.1 Program Infrastruktur Jalan	86
5.2 Pertemuan Formal Level Mikro	91
5.3 Musyawarah Dusun (Musdus)	93
5.4 Musyawarah Desa (Musdes)	102
5.5 Pertemuan Formal Level Mezzo Musrenbang Kecamatan	110
5.6 Pertemuan Level Makro	116
5.6.1 Forum OPD DPUPR	116
5.6.2 Musrenbang Kabupaten	122
5.7 Pertemuan Informal	128
5.7.1 Forum Warga	129
5.7.2 Pertemuan Majelis Taklim	135
5.8 Ikhtisar	141
<b>VI RUANG PUBLIK DALAM PROGRAM JAMSOSRATU</b>	<b>146</b>
6.1 Program Jamsosratu	146
6.2 Pertemuan Formal Level Mikro	155
6.2.1 Koordinasi Tenaga Pendamping dan RTSM	155
6.3 Pertemuan Level Makro	161
6.3.1 Forum OPD Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang	162
6.3.2 Musrenbang kabupaten	169
6.4 Pertemuan Informal	172
6.4.1 Forum warga	173
6.4.2 Pertemuan Majelis Taklim	179
6.5 Ikhtisar	183
<b>VII TINDAKAN BERBAHASA DAN ORIENTASI KOMUNIKASI POLITIK</b>	<b>186</b>
7.1 Tindakan Berbahasa Ulama dan Jawara	188
7.1.1 Pesan Kognitif	190
7.1.2 Pesan Interaktif	192
7.1.3 Pesan Ekspresif	194
7.1.4 Orientasi Politik Ulama dan Jawara	196
7.2 Ikhtisar	202
<b>VIII TIPE TINDAKAN KOMUNIKATIF <i>ELITE</i> LOKAL DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>204</b>
8.1 Tipe Tindakan Komunikatif	207
8.1.1 Tipe Tindakan Teleologis	208
8.1.2 Tipe Tindakan Normatif	210
8.1.3 Tipe Tindakan Dramaturgis	212

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



8.1.4 Tipe Tindakan Komunikatif	213
8.2 Oligarkhi Politik <i>Elite</i> Lokal	216
8.3 Ikhtisar	221
<b>IX TELAAH PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN</b>	223
9.1 Ruang publik dan kerumitan komunikasi	223
9.2 Prasyarat demokrasi dan transformasi komunikasi	227
9.3 Komunikasi Pembangunan Partisipatif	232
9.4 Konvergensi Komunikasi	235
9.5 Ruang Publik Alternatif	236
9.6 Ikhtisar	240
<b>X SIMPULAN DAN SARAN</b>	242
10.1 Simpulan	242
10.2 Saran	244
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	246
<b>LAMPIRAN</b>	258
Lampiran 1 Transkrip Wawancara	259
Diskusi Dengan Kades Purwaraja	259
Diskusi Dengan Jawara	265
Lampiran 2 Buku Catatan Harian Peneliti	269
Lampiran 3 Contoh catatan lapangan	271
<i>Musrenbangdes Girijaya Kecamatan Saketi</i>	271
Lampiran 4 Refleksi hasil observasi	277
Pengajian Majelis Taklim Jamiatul Fata Ciandur Saketi, KH.Yusuf.	277
Obrolan lepas ibu-ibu diwarung	280
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	282

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## DAFTAR TABEL

2.1 Pendekatan Komunikasi	10
2.2 Keterkaitan Antara Kepentingan dan Pengetahuan	21
2.3 Relasi Format - Logis	22
2.4 Model Komunikasi dan Bentuk Tindakan Berbahasa	23
2.5 Peta posisi penelitian	33
2.6 Definisi konseptual	37
3.1 Pemetaan Perspektif Konstruktivis	43
3.2 Fokus penelitian dan Tujuan	45
3.3 Daftar pertemuan formal dan informal yang diteliti	46
3.4 Sebaran key informan dan informan	50
4.1 Jabatan ulama dalam pemerintah	57
4.2 Tipologi ulama dan jawara	80
4.3 Jumlah penduduk Kab. Pandeglang	83
4.4 Kemiskinan dan indikator kemiskinan	83
4.5 Ruas jalan di Kabupaten Pandeglang	84
5.1 Matrix pesan dalam program infrastruktur jalan	90
5.2 Matrix konstruksi tema pertemuan Musdus	94
5.3 Matrix konstruksi tema Musdes	105
5.4 Matrix konstruksi tema Musrenbang kecamatan	112
5.5 Matrix konstruksi tema forum OPD	118
5.6 Matrix konstruksi tema forum OPD	124
5.7 Matrix konstruksi tema forum warga	130
5.8 Matrix konstruksi tema pertemuan majelis taklim	138
6.1 Matrix konstruksi tema Jamsosratu	152
6.2 Matrix konstruksi tema program Jamsosratu	156
6.3 Matrix konstruksi tema forum OPD	165
6.4 Matrix konstruksi tema Musrenbang Kabupaten	169
6.5 Matrix konstruksi tema forum warga	174
6.6 Matrix konstruksi tema majelis taklim	179
7.1 Matrix konstruksi tema dalam tindakan berbahasa	189
7.2 Matrix konstruksi tema orientasi politik	197
8.1 Matrix konstruksi tema tipe tindakan komunikasi	207
8.2 Matrix konstruksi model tindakan komunikatif	218

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Histori Defisit Rasio (Budiyanti 2017)	18
2.2 Klaim-klaim tindakan komunikatif Habermas	20
2.3 Sebaran persentase <i>State Of Art</i>	25
2.4 <i>State Of Art</i>	32
2.5 Kerangka Berfikir	36
3.1 Model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992)	51
4.1 Silsilah ulama di Pandeglang	62
4.2 Silsilah Jawara di Pandeglang	64
4.3 Perbandingan aktivitas keagamaan dan pembangunan	67
4.4 Struktur kekuasaan ulama dan jawara	68
4.5 Ulama, jawara dan umaro dalam stratifikasi sosial masyarakat Banten	76
4.6 Peta Kabupaten Pandeglang	82
5.1 <i>World cloud</i> program infrastruktur jalan	87
5.2 <i>Word tree</i> program infrastruktur jalan	88
5.3 Diagram <i>penn</i> program infrastruktur jalan	89
5.4 Kegiatan pengajian majelis taklim	136
5.5 Kegiatan sosialisasi pembangunan dan kegiatan majelis taklim	137
5.6 Komunikasi politik dalam program infrastruktur jalan	143
6.1 Struktur kelembagaan Jamsosratu	147
6.2 <i>Word Cloud</i> Jamsosratu	148
6.3 <i>Word tree</i> program Jamsosratu	149
6.4 <i>Diagram penn</i> program Jamsosratu	150
6.5 Pertemuan Jamsosratu	160
6.6 Pertemuan formal level makro	162
6.7 Pola relasi dalam program Jamsosratu	184
7.1 <i>Word cloud</i> komunikasi politik ulama dan jawara	186
7.2 <i>Word tree</i> tindakan berbahasa	187
7.3 <i>Diagram penn</i> tindakan berbahasa	188
7.4 Pola dan arus komunikasi ulama dan jawara	195
7.5 Orientasi komunikasi politik ulama dan jawara	199
7.6 Pengrajin emping di Pandeglang	200
8.1 <i>Word cloud</i> politik dan oligarki	204
8.2 <i>Word tree</i> tipe tindakan komunikatif	205
8.3 <i>Diagram penn</i> model tindakan komunikatif	206
8.4 Model dominan tindakan komunikatif	215
8.5 Pola oligarki <i>elite</i> lokal dalam pembangunan	220



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	259
Lampiran 2 Buku Catatan Harian Peneliti	269
Lampiran 3 Contoh Catatan Lapangan	271
Lampiran 4 Refleksi Hasil Observasi	277

@Halaman milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.